

Penulisan Ulang Sejarah vs Premanisme Digital

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Dalam wawancara di sebuah stasiun TV nasional, Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadli Zon yang dibesarkan di Cisarua, Kabupaten Bogor itu, mengemukakan niatnya untuk meng-inisiasi proyek besar penulisan (ulang) sejarah nasional Indonesia. Niat baik ini langsung disambut pro-kontra dari para sejarawan senior. Banyak yang mengkhawatirkan niat baik ini nantinya akan “terkontaminasi” oleh kepentingan politik kontemporer, karena sang menteri yang walau pun seorang sejarawan, tapi lebih dikenal sebagai politisi dari partai yang berkuasa. Lagipula, kita sudah punya “*Indonesia Dalam Arus Sejarah*” yang diterbitkan pada tahun 2012, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lengkap Vol. 1 sampai 9, dalam edisi lux, yang belum pernah di-koreksi atau diberi tambahan. Sejarah ditulis oleh pihak yang menang, kata pepatah, tapi menang terhadap siapa yang jadi “lawan”-nya?

Sementara itu, mulai terdengar berita-berita tentang penyalah-gunaan teknologi digital yang canggih untuk berbagai tindak kriminal “premanisme” berupa ancaman dan pemerasan. Modus-nya menggunakan aplikasi penyuntingan video (*video-editing*) yang disebut “*deep-fake*”. Dalam salah satu kasusnya, yang menjadi korban adalah seorang ASN di daerah. Foto-fotonya di sosial media diambil, kemudian dibuatkan video (asusila) dengan bantuan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*, AI). Pelaku kemudian menggunakan video editan ini untuk memeras korban dengan mengancam untuk mem-”viral”-kannya. Di sini yang berlaku sebagai preman, tentu bukan AI-nya, melainkan orangnya, yaitu si pengguna AI. Olehnya itu, kita sebut perilaku ini sebagai premanisme digital, bukan premanisme oleh AI. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, baru-baru ini dimanfaatkan video-nya untuk suatu kasus penipuan. Sulit membedakan video “palsu” dengan yang aslinya, sehingga banyak korban yang tertipu. Jika saat ini Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) harus turun ke lapangan membawa “*crew*” lengkap dengan beberapa kamera untuk membuat konten video-nya, selanjutnya nanti beliau cukup memerintahkan anak-buahnya untuk bekerja dengan *laptop*-nya masing-masing untuk membuat video editan, yang seolah-olah merupakan video dokumenter, hampir tidak ada bedanya dengan video “asli” yang diambil menggunakan kamera.

Dalam berbagai kasus yang lalu, seperti kasus peretasan data di Pusat Data Nasional (Sementara), kasus-kasus pornografi, pinjaman *on-line* (pinjol), judi *on-line* (judol), perdagangan orang, peredaran uang palsu, dan macam-macam bentuk kriminalitas berbasis teknologi digital lainnya,

pemerintah hanya sempat bertindak sebagai pemadam kebakaran, berusaha mengatasi setelah kasus-kasusnya marak terjadi. Untuk teknologi penyuntingan video ini, seyogyanya pemerintah dapat bertindak lebih antisipatif. Sebelum teknologi canggih ini marak disalah-gunakan oleh para pelaku kejahatan, seyogyanya pemerintah dapat terlebih dahulu memanfaatkannya untuk kebaikan, sehingga masyarakat dapat dicerdaskan dalam memilih mana konten yang baik dan benar, dan mana konten yang merupakan modus premanisme digital.

Salah satunya adalah usulan kepada Dr. Fadli Zon. Daripada bersusah-payah membuat proyek penulisan ulang sejarah yang kontroversial, lebih baik membuat proyek pembuatan video – yang seolah-olah merupakan video dokumenter – dari cuplikan berbagai peristiwa sejarah yang penting, dengan memanfaatkan teknologi *video-editing* yang tercanggih saat ini. Proyek ini akan menghasilkan seolah-olah laporan pandangan mata yang realistik (karena dibuat dengan bantuan AI) dari peristiwa seperti Perang Diponegoro (atau peristiwa sebelum itu), Konggres Pemoeda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, Tragedi 30 September 1965 dan seterusnya sampai ke Tragedi Semanggi dalam Reformasi 1998. Tentu saja proyek ini tidak hanya melibatkan para sejarawan, tapi juga para kreator konten dari generasi muda, sehingga sekali gus juga akan membangkitkan minat mereka terhadap sejarah bangsanya sendiri. Hasilnya berupa video yang tersimpan abadi di awan digital selamanya, sehingga tentunya akan lebih bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya, daripada hasil penulisan ulang sejarah yang berupa buku-buku tebal ber-volume-volume yang tersimpan di perpustakaan. Lagipula, jika di kemudian hari ada informasi baru terkait peristiwa sejarah yang sudah di-video-kan, bisa dengan mudah dibuatkan revisi-nya sehingga selalu terbarukan. Atau jika nanti ada teknologi yang lebih canggih lagi, tentu bisa dimanfaatkan untuk membuat versi yang lebih canggih. Siapa tahu, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita tidak hanya bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa bersejarah di layar kaca, tapi juga lebih realistik lagi dalam format 3D dengan teknologi holografis, di atas meja.

Gunung Batu, medio Juni 2025